

Sambutan Gubernur Bank Indonesia

"Integrasi Global: Masih Adakah Pilihan Kita?"

Ketika Bernard Mandeville, sang satiris politik abad 18, melantunkan *Fable of the Bees*, dunia teks di barat kembali menghadirkan sebuah kontroversi yang seduktif, setelah sempat tampil sangat membosankan selama beberapa abad. Bait-bait reflektif Mandeville menyiratkan sebuah pemikiran bahwa kepentingan pribadi dan bukannya etika Stoic, yang menjadi *raison d'être* kesejahteraan bersama. Kita kemudian teringat kisah ilustratif klasik oleh Adam Smith mengenai roti dan daging di meja makan kita. Hidangan itu hadir bukan karena kemuliaan jiwa Jimmy the Baker atau Billy the Butcher, melainkan hasil sebuah motif *ulterior non-altruistic* untuk pemuasan kepentingan pribadi, yang diujungnya secara tidak sengaja, menyenangkan semua termasuk kita si konsumen. Para pemikir kemudian menarik sebuah implikasi bahwa mendorong pemuasan kepentingan pribadi dan menjamin tersedianya kontrak '*Leviathan*' yang berkeabsahan adalah sebuah taruhan terbaik dan rasional bagi para pemutus kebijakan publik. Dari implikasi ini sebuah kekuatan kultural baru terbentuk, yang kemudian membuat dunia hampir tanpa jeda, berkembang sangat maju, produktif, modern, global dan rasional dalam satu abad terakhir.

Namun dalam satu abad terakhir ini pula terdengar keluhan-keluhan tentang dunia yang *sophist*. Meminjam personifikasi Yunani

kuno bahwa negara adalah satu individu yang besar, tidak sepenuhnya salah bila mengatakan bahwa di abad 20 dan pada awal abad 21 ini perlombaan untuk memuaskan kepentingan masing-masing negara sudah menjadi sebuah tatanan dan wacana keseharian. Diluar sana adalah sebuah hutan belantara, seperti catatan Trasymachus, sang filsuf *sophist* Yunani bahwa yang kuat adalah yang menang. Oleh sebab itu, negara-negara wajib berkompetisi untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi dan kelestarian hidup masing-masing. Menjadi negara yang kompetitif adalah kiat bertahan hidup dalam dunia yang mengglobal yang sering kali tidak berkeadilan, berstandar ganda, dan *deceptive*. Disisi lain, retorika tentang sebuah impian mulia kerjasama antar negara yang mengharukan diperbincangkan dengan tata sopan santun diplomatik yang sempurna, namun meminjam Kissinger, perbincangan retorik itu bukanlah empirik dari *real-politic*.

Dalam lingkungan strategis dan kondisi *real-politic* yang demikian, kita harus menentukan pilihan. Kita dapat memilih untuk bersikap seperti korban (*the victim attitude*) dan menyalahkan kondisi *real-politic* ekonomi internasional atas setiap kemalangan yang menimpa. Kita lalu dapat mengambil langkah radikal dengan menutup diri seperti mereka yang percaya pada teori ketergantungan (*dependency paradigm*). Akan tetapi, "*fortresses without good armies cannot defend you*", begitu kata Machiavelli dalam *Discourses upon the First Ten Books of Titus Livy*. Pilihan kedua, kita sebagai bangsa dapat pula bersikap seperti burung unta dan hidup dalam ilusi bahwa ekuilibrium ekonomi-politik internasional adalah terjadinya koordinasi dan kerjasama antar negara secara serta merta dan natural. Namun, jika ini sikap yang kita pilih maka mungkin perlu kita renungkan perkataan Noam Chomsky: "*If we choose, we can live in a world of comforting illusion*". Pilihan lainnya adalah kita dapat bersikap adaptif terhadap situasi dan menempuh jalan diplomasi ekonomi yang menitik beratkan kepentingan *real-politic* ala Kissinger. Tapi jalan seperti ini tentu sangat melelahkan. Tidak demikian seharusnya titik berangkat di...

saya cenderung mengatakan bahwa kita perlu menempuh jalan lain dengan selalu memperkuat diri sendiri agar dapat lestari dalam tata ekonomi global saat ini dan kedepan, tanpa perlu memberi luka pada pihak lain. *Real-politic* yang berwarna-warni itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang relevan bagi sebuah tekad untuk memperkuat diri dan menjadikan Indonesia ini lebih bernilai dan bermanfaat bagi dirinya sendiri dan bagi bangsa lain di muka bumi. Dalam kaitan itulah, kita kemudian dapat mengatakan bahwa kebutuhan bangsa-bangsa untuk berkontribusi dalam mempertahankan kelestariannya di muka bumi dan bekerjasama merupakan pilihan kegiatan yang rasional. Hanya saja, kadang-kadang insentif untuk kerja kolektif belum tentu kompatibel bagi setiap negara, dan karenanya *non-cooperation* sering menjadi ekuilibrium dalam forum kerjasama ekonomi internasional.

Saya berpandangan bahwa, kompatibilitas insentif bagi kerja kolektif antar bangsa-bangsa terletak pada kontribusi apa yang bisa diberikan oleh masing-masing pihak yang bekerjasama. Jika garis pikir ini dapat diterima maka sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk memperkuat diri dan membuat bumi nusantara menjadi suatu entitas ekonomi yang produktif, efisien, aman, terbuka luas bagi semua pelaku ekonomi, dengan hukum serta regulasi yang tertata rapi, tegak dan berlaku adil. Ini semua selain akan bermanfaat bagi kita sendiri, juga akan menjadikan kita lebih menarik dan lebih kompatibel bagi pihak lain untuk menjalin kerjasama. Begitulah seharusnya titik tolak berpikir kita sebelum memulai setiap kerjasama dan diplomasi ekonomi di awal abad-21 ini. Kita tentu tidak bisa berharap suatu negara akan membuka kerjasama dengan negara lain yang perekonomiannya gagal (*a failed economy*) karena diujungnya sebuah perekonomian yang gagal adalah cikal bakal sebuah negara yang gagal (*a failed state*). *A good product will sell itself* kata para ahli pemasaran, demikian pula *a good nation*.

Di era paska krisis Asia ini, ekonomi Indonesia sudah berada dalam lintasan (*track*) yang saya yakin akan membawa kita kembali menjadi salah satu dari *the Asian miracles* seperti di masa sebelum

krisis. Pasar-pasar keuangan kita sudah jauh lebih dalam dan sehat, ditunjang oleh instrumen-instrumen pasar modal, pasar obligasi, pasar uang dan pasar valas yang lebih beragam jika dibanding sebelum krisis. Sistem perbankan kita juga saat ini sudah jauh lebih sehat, lebih stabil, dan lebih siap menyumbang pada pembangunan nasional jika dibandingkan sebelum krisis. Sementara itu, sistem nilai tukar yang mengambang bebas telah banyak membantu perekonomian kita menahan gejolak di pasar global.

Namun disamping semua kekuatan itu, masih banyak yang perlu kita benahi agar perekonomian bangsa ini memiliki landasan yang lebih rasional bagi bangsa lain untuk menjalin kerjasama ekonomi. Kita masih memerlukan reformasi yang sangat mendalam yang menyentuh berbagai aspek kehidupan ekonomi-politik bangsa, yang selama ini mungkin kita lupa memulainya. Di awal abad ini, kita perlu segera memulai reformasi tersebut, karena ia adalah tanaman jangka panjang yang hasilnya baru akan dipetik oleh generasi penerus bangsa ini. Agar bermanfaat, reformasi tersebut perlu kita mulai dari yang terberat yaitu membenahi berbagai distorsi struktural di sektor riil dan memperbaiki etos serta budaya kerja kita. Keduanya saat ini sedang melemahkan semangat dunia usaha, menurunkan daya saing, menggerus ketahanan ekonomi bangsa, dan membuat kita kurang kompatibel bagi bangsa lain untuk menjalin kerjasama ekonomi. Kita belum pernah sebelumnya mengambil jalan seperti itu karena kita tahu bahwa prosesnya akan sangat menyakitkan, terutama bagi sebagian dari kita yang sudah terlanjur hidup dalam keistimewaan. Bahkan, saya bisa mengatakan bahwa tidak banyak negara-negara di dunia yang telah melakukannya. Sebuah jalan yang memang sangat jarang dilalui dan karenanya menimbulkan keraguan untuk melintasinya. Ini mengingatkan saya pada sebuah untaian bait puisi yang menyimpan sebuah pesan yang baik untuk kita renungkan:

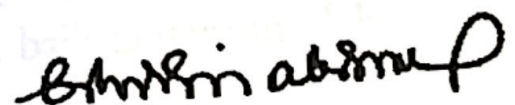
*I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I,
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.*

—Robert Frost (1920): The Road not Taken

Dengan catatan akhir diatas, saya ingin menutup sambutan singkat ini dan menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Internasional – Bank Indonesia yang telah menyusun buku yang berguna ini. Buku ini tentu dapat menjadi referensi yang baik bagi para pemutus kebijakan di Bank Indonesia, juga di lembaga-lembaga pemerintahan lainnya. Didalam buku ini terdapat berbagai konsideran bagi para pemutus kebijakan publik di pemerintahan ketika mereka harus mengambil jalan yang sangat jarang dilalui itu dan memulai sebuah *zeitgeist* yang baru, yang tentunya akan lebih baik dari yang lalu.

Selamat membaca.

Jakarta, 22 Maret 2007
BANK INDONESIA
GUBERNUR



Burhanuddin Abdullah